KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2015 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2016.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KEPMEN-KP/2016
TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Perencanaan Ruang Laut												
2.	Peraturan Pemerintah	Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
3.	Peraturan Presiden	Batas Sempadan Pantai												
4.	Peraturan Presiden	Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing												
5.	Peraturan Menteri	Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan												
6.	Peraturan Menteri	Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
7.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Nipah												
8.	Peraturan Menteri	Tata Cara Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
9.	Peraturan Menteri	Akreditasi terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
10.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan												
11.	Peraturan Menteri	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi												
12.	Peraturan Menteri	Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Hiu												
13.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2015 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Survei dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)												
14.	Keputusan Menteri	Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBP (Reklamasi dan BMKT) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan												
15.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*)												
16.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan atau Pulau-Pulau Kecil: a) KKP3K Sukabumi; b) KKP3K Maluku Tenggara; c) KKP3K Mentawai; d) KKP3K Berau; e) KKP3K Flores Timur; dan f) KKP3K Biak.												

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Kapal Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets)* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan												
5.	Peraturan Menteri	Penerbitan SIUP dan SIPI Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang												
6.	Peraturan Menteri	Kartu Nelayan												
7.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan: a. Lemuru; b. Ikan Terbang; c. Rajungan												
8.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan di 10 (sepuluh) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Pembudidayaan Ikan												
2.	Peraturan Menteri	Cara Pembenihan Ikan yang Baik												
3.	Peraturan Menteri	Pakan Ikan												
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan												
5.	Peraturan Menteri	Cara Pembesaran Ikan yang Baik												
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pembesaran Udang												
7.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Rumput Laut												
8.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan												

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pengendalian Mutu Mutiara Laut Selatan *(South Sea Pearl)* Indonesia yang Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Operasionalisasi Kapal Pengolah Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan												
4.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan												
5.	Peraturan Menteri	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib												
6.	Peraturan Menteri	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib												
7.	Peraturan Menteri	Kemitraan pada Sektor Kelautan dan Perikanan												
8.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional												
9.	Peraturan Menteri	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan												
10.	Keputusan Menteri	Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia 7 (tujuh) Produk Perikanan Non Konsumsi												

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Pengawasan Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Kapal Markas												
4.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Pesawat Patroli												

6. Inspektorat Jenderal

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Pembangunan Budaya Integritas												

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Presiden	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
2.	Peraturan Menteri	Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Negara Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan												
4.	Keputusan Menteri	Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan												

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang												
2.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan												
5.	Keputusan Menteri	Penetapan Taman Teknologi (*Technopark*)												

9. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogenik Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Keluarnya dari Wilayah Negara Republik Indonesia												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Penerapan Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) pada Rantai Bisnis Perikanan												
4.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Area yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawanya di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia												
5.	Keputusan Menteri	Jejaring Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan												
6.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina												

10. Biro Perencanaan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017												
2.	Peraturan Menteri	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 yang Dilimpahkan ke Gubernur Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan												
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Kelautan dan Perikanan												
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan												
7.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017												

11. Biro Kepegawaian

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir												
2.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir												
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
6.	Peraturan Menteri	*Road Map/Grand Design* Penataan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
7.	Peraturan Menteri	Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
8.	Peraturan Menteri	Pedoman Evaluasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit												
9.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan												

12. Biro Keuangan

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengadministrasian Pengelolaan Barang Milik Negara												
3.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Piutang Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Akrual												
7.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaporan Penatausahaan Persediaan Berbasis Akrual												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
8.	Peraturan Menteri	Pedoman Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												
9.	Peraturan Menteri	Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												

13. Biro Hukum dan Organisasi

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Presiden	Percepatan Pengembangan Armada Kapal Perikanan Nasional												
2.	Peraturan Presiden	Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Fishing Vessel Personnel*, 1995												
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan												
6.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
7.	Keputusan Menteri	Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019												
8.	Keputusan Menteri	Penetapan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan												

14. Biro Umum

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2014 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

15. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Antar Lembaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

16. Pusat Data, Statistik, dan Infomasi

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2016-2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Mekanisme Penyelenggaraan Data Statistik Kelautan Perikanan												

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini